



# MIMIKA MEMBANGUN



*Eme Neme Yauware*

AUDIENSI

PEMERINTAH DAERAH, DPRD, DAN TOKOH MASYARAKAT

KABUPATEN MIMIKA

JUR PENAN D



## Salam Redaksi

Pembaca yang terhormat, Media Bappeda ini kami hadirkan sebagai implementasi dari tanggungjawab kami untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang lengkap dan benar atas berbagai aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Mimika.

Percepatan pembangunan terus dilakukan oleh pemerintah, baik infrastruktur maupun pelayanan publik dan pengembangan sumber daya manusia, serta mental spiritual, secara bersamaan dan sinergis, dengan melibatkan semua unsur dalam pemerintahan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Mimika.

Media ini adalah dokumentasi atas sebagian dari perjalanan pembangunan di Kabupaten Mimika. Kami persembahkan untuk seluruh lapisan masyarakat sebagai salah satu sumber informasi atas kiprah pemerintah yang benar, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk peningkatan kualitas Media ini dan bagi kemajuan pembangunan di Mimika.

Tim Redaksi

### Pengarah

Bupati Mimika

### Penanggungjawab

Kepala Bappeda

### Tim Redaksi

#### Koordinator

Sekretaris Bappeda Mimika

#### Anggota :

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan Ekonomi

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kepala Bidang Pengendalian

Kantor Bappeda Kabupaten Mimika  
Jl. Cendrawasih SP.II, Utikini Baru,  
Kec. Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua. 99963



# Mimika Membangun Edisi November

## Daftar Isi

- Laporan Utama Hal. 3-7
- Laporan Khusus Hal. 7-21
- Bidang Infrastruktur Hal. 22-27
- Bidang Sosial Budaya Hal. 28-41
- Bidang Ekonomi Hal. 42-47



# Bupati, DPRD dan Masyarakat Mimika Deklarasi Pembentukan Provinsi Papua Nemangkawi

**U**SULAN pembentukan daerah otonom baru di Tanah Papua kembali muncul. Kali ini dari Kabupaten Mimika yang ingin membentuk provinsi sendiri bernama Provinsi Papua Nemangkawi. Sejalan dengan itu, Mimika juga mengusulkan pemekaran Kotamadya Timika, Kabupaten Mimika Timur dan Kabupaten Mimika Barat.

Pembentukan Provinsi Papua Nemangkawi ini secara resmi dideklarasikan oleh Bupati Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Mimika beserta tokoh masyarakat perwakilan dua suku besar Amungme dan Kamoro. Deklarasi dilaksanakan di Hotel Yello Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).



Foto: Bappeda

**Bupati Mimika, Eltinus Omaleng bersama pimpinan dan anggota DPRD Mimika serta masyarakat mendeklarasikan Provinsi Papua Nemangkawi.**



Foto: Bappeda

Kesepakatan bersama ini langsung diserahkan kepada Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Valentinus Sudarjanto Sumito, SIP MSi.

Ada lima poin kesepakatan yang di-deklarasikan bersama. Pertama, mendukung sepenuhnya pembentukan Provinsi Papua Nemangkawi dengan ibukota di Timika. Kedua, mendukung sepenuhnya pembentukan Kota Timika di Timika. Ketiga, mendukung sepe-

nuhnya pembentukan Kabupaten Mimika Barat dengan ibukota di Kampiraya. Keempat, mendukung sepenuhnya pembentukan Kabupaten Mimika Timur dengan ibukota di Agimuga. Kelima, dengan telah ditandatanganinya berita acara kesepakatan bersama ini maka



Foto: Bappeda



Provinsi Papua Nemangkawi, Kota Timika, Kabupaten Mimika Timur dan Kabupaten Mimika Barat dinyatakan secara resmi dideklarasikan.

Deklarasi dan kesepakatan ini ditandatangani oleh Bupati Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH, 20 anggota DPRD Mimika, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng mengatakan Papua diberi kesempatan untuk melakukan pemekaran sehingga ini menjadi peluang bagi Mimika membentuk provinsi sendiri. Pasalnya dimasukkannya Mimika dalam Papua Tengah dan wilayah adat Mee Pago, secara demografi tidak sesuai karena seharusnya Mimika masuk dalam wilayah adat Domberay.

Ditambah lagi Mimika memiliki sumber daya yang besar sehingga layak untuk membentuk provinsi sendiri demi kesejahteraan masyarakat Mimika dalam hal ini Amungme dan Kamoro. "Amungme dan Kamoro tidak pernah bergabung dengan siapapun, kita harus berdiri sendiri. Kita harus miliki provinsi dan kabupaten sendiri," tegasnya.

Bupati Omaleng mendorong percepatan pembentukan provinsi dan pemekaran kabupaten. Tidak hanya dari sisi pemerintahan, Bupati dan DPRD



Foto: Bappeda

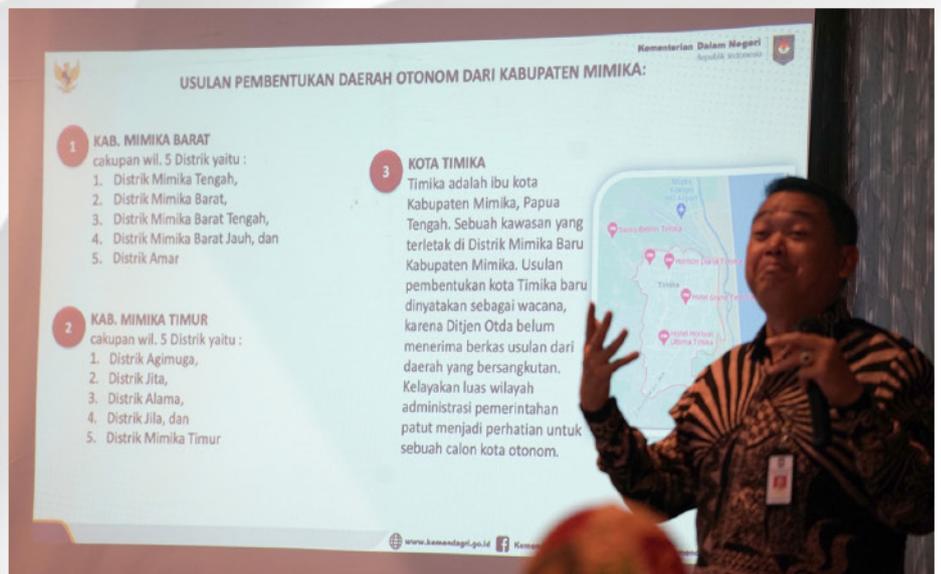


Foto: Bappeda



Foto: Bappeda

juga sepakat untuk membentuk tim yang akan berjuang ke DPR RI atau lewat jalur politik.

Bupati Omaleng juga menyatakan,

provinsi baru ini bakal menjadi provinsi dan kabupaten dengan konsep Otonomi Khusus yang sepenuhnya. Sehingga ia meminta legislatif membuat

sebuah Peraturan Daerah yang mengatur kabupaten dan provinsi harus dipimpin oleh orang asli Papua. Khususnya di Mimika Barat harus dipimpin orang



Foto: Bappeda



Kamoro. Mimika Timur harus dipimpin orang Amungme.

Ia menegaskan, usulan ini sebagai bentuk penolakan Nabire sebagai ibukota Papua Tengah karena yang seharusnya berada di Mimika. Pemkab Mimika kata dia, yang sejak awal berjuang bahkan sudah menyiapkan infrastruktur untuk Papua Tengah. Sehingga apabila ibukota dialihkan ke Mimika maka, Pemkab sudah menyiapkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

Wakil Ketua DPRD Mimika, Johanis Felix Helyanan mendukung langkah Bupati Mimika dalam membentuk provinsi sendiri yang berkedudukan di Mimika. Juga percepatan pemekaran kabupaten yang sudah lama direncanakan namun belum terwujud.

“Kita sejak dulu berharap Timika jadi ibukota, kemudian pemekaran kabupaten. Pada prinsipnya kita ingin supaya ada provinsi baru di Mimika. Ini hal

positif, kalau kita kompak perjuangkan dan berharap ditindaklanjuti,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Menurutnya, Mimika memiliki perkembangan yang cukup pesat dan sumber daya yang cukup besar. “Mimika, dengan perkembangan sudah layak bentuk DOB. Jadi saya pribadi, mari kita dukung, kalau memang itu baik. Kita harus punya wacana bentuk kabupaten dan provinsi baru,” katanya.

Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah pada Direktorat Jenderal Dalam Negeri, Valentinus Sudarjanto Sumito, SIP MSi menyambut baik adanya usulan dari Kabupaten Mimika. Bahkan kata Valentinus, pemekaran Kabupaten Mimika Barat dan Kabupaten Mimika Timur sudah masuk dalam prioritas yang ditetapkan lewat Surat Presiden.

Menurutnya Kabupaten Mimika se-

bagai daerah induk masih layak untuk dimekarkan menjadi beberapa daerah otonom kabupaten/kota. Untuk peningkatan pelayanan pemerintahan bagi masyarakat di wilayah yang sangat luas dan beragam, sehingga wacana pemekaran daerah sebuah ide yang sangat logis dan layak diperjuangkan.

Ide pemekaran Kabupaten Mimika menjadi sebuah daerah otonom provinsi dapat dimungkinkan terjadi, selain karena luas wilayah dan bentangan alam yang kaya raya dan penuh potensi, mayoritas masyarakat di Kabupaten Mimika tumbuh dengan IPM tertinggi kedua setelah Kota Jayapura di Tanah Papua pada Tahun 2017-2019.

Tapi terkait usulan ini dikatakan Valentinus, harus dilakukan sesuai prosedur dan didasarkan pada aturan. Apalagi saat ini pemerintah masih menerapkan moratorium pemekaran. (BAPPEDA)

## Pemetaan Wilayah Pemekaran

### Kabupaten Mimika Barat

- Distrik Mimika Tengah
- Distrik Mimika Barat
- Distrik Mimika Barat Tengah
- Distrik Mimika Amar
- Distrik Mimika Barat Jauh

### Kabupaten Mimika Timur

- Distrik Agimuga
- Distrik Jita
- Distrik Alama
- Distrik Jila
- Distrik Mimika Timur

### Kotamadya Timika

- Distrik Mimika Baru

### Kabupaten Mimika (Induk)

- Distrik Mimika Timur Jauh
- Distrik Kuala Kencana
- Distrik Tembagapura
- Distrik Kwamki Narama
- Distrik Hoeya
- Distrik Iwaka
- Distrik Wania

# Bupati Serahkan Pagu APBD 2024 Bagi OPD

**B**UPATI Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH didampingi Pj Sekda Mimika, Ir Dominggus Robert Harry Mayaut, ST MSi secara resmi menyerahkan pagu anggaran kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik itu dinas, badan, bagian dan distrik. Adapun total pagu pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024 sebesar Rp 7,5 triliun.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng saat menyerahkan pagu anggaran pada Senin (6/10/2023) di Jakarta mengatakan nilai RAPBD memang terdengar cukup besar. Tapi setelah dibagi ke OPD untuk digunakan membiayai program tentu belum mampu mengcover secara keseluruhan.

Untuk itu ia menekankan kepada OPD akan menyusun program prioritas yang menyentuh langsung kepada masyarakat. "Jangan pikir semua program program harus diakomodir, karena belanja harus disesuaikan dengan pen-



Foto: Bappeda

dapatan," tegas Bupati Omaleng.

Setelah pembagian pagu anggaran, Bupati Omaleng meminta OPD untuk segera menjabarkan program usulan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA). Bupati memberi deadline waktu selama dua hari sejak penyerahan pagu. Se-

hingga KUA PPAS bisa secepatnya diserahkan kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam sidang paripurna. "Sebelum Desember sudah harus ditetapkan," tandasnya.

Pembahasan kata Bupati harus dipercepat mengingat para anggota DPRD



**Bupati Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH didampingi Pj Sekda Mimika, Ir Dominggus Robert Harry Mayaut, ST MSi secara resmi menyerahkan pagu anggaran kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik itu dinas, badan, bagian dan distrik**

sedang memasuki masa sibuk dalam rangka persiapan Pemilu sehingga sindaco Pemkab sebagai eksekutif harus bekerja cepat.

Bupati Omaleng menambahkan, RAPBD Tahun 2024 ditarget naik sebesar Rp7,5 triliun. Hanya naik sekitar Rp 300 miliar dari APBD Tahun 2023 setelah perubahan sebesar Rp7,2 triliun.

Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling, MSi mengatakan jadwal penyusunan dan pembahasan RABD 2024 harus diikuti. Dimana tim anggaran menjadwalkan penyelesaian KUA PPAS termasuk review di Inspektorat pada minggu ini. Sehingga pekan depan dokumen dokumen KUA PPAS sudah diserahkan ke DPRD untuk selanjutnya dibahas bersama TAPD dan Banggar DPRD Mimika.

Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah, Dwi Cholifah mengatakan per 1 November 2023, pendapatan sdah mencapai Rp 5,1 triliun. "Artinya APBD induk kita sudah tercapai, tinggal penambahan dalam APBD Perubahan menjadi Rp5,9 triliun adi kurang lebih sekitar Rp 800 miliar yang harus kita kejar," katanya.

Beberapa sumber penerimaan yang



Foto: Bappeda

masih minim diantaranya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang baru terealisasi 55,57 persen atau Rp 98 miliar dari total Rp177 miliar. Kemudian dana Otonomi Khusus baru 51,22 persen dari total Rp 154 miliar. Dana desa baru mencapai 68 persen.

la juga menjelaskan bahwa nilai APBD Tahun 2023 setelah perubahan mencapai Rp7,2 triliun. Itu adalah total belanja. Sementara pendapatan sebesar Rp5,9 triliun ditambah pembiayaan atau Sisa Lebih Penggunaan Anggaran

(SILPA) Tahun 2022 sebesar Rp1,2 triliun sehingga jika ditambahkan mencapai Rp 7,2 triliun.

Kemudian di Tahun 2024, penerimaan daerah bersumber dari dana perimbangan yang ditargetkan sebesar Rp3,5 triliun. Kemudian dividen PT Freeport Indonesia 2,5 persen atau Rp 2 triliun. Kemudian Pendapatan Asli Daerah dan lainnya ditarget Rp 2 triliun. Sumber penerimaan yang sedang didorong oleh Pemkab Mimika yakni BPHTB PT Freeport Indonesia. (BAPPEDA)



Foto: Bappeda

# Bupati Mimika Serahkan 8 Raperda Untuk Ditetapkan DPRD

**S**EBELUM memasuki pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Mimika mengajukan delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) non APBD untuk dibahas dan ditetapkan DPRD Mimika.

Materi dari delapan Raperda tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH kepada pimpinan disaksikan anggota DPRD Mimika dalam pembukaan Rapat Paripurna I Masa Sidang III DPRD Mimika tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Non APBD pada Rabu (15/11/2023).

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah dikatakan Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng, perlu dibentuk peraturan daerah sebagai dasar hukum,

yang berfungsi dan mengendalikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan batasan-batasan tertentu dan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

"Karena peraturan daerah sangatlah penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai asas legalitas dalam negara hukum," papar Anton.

Sementara itu Bupati Mimika, Eltinus Omaleng mengatakan dari delapan Raperda yang diajukan tiga diantaranya adalah inisiatif DPRD Mimika dan lima Raperda usulan Pemkab Mimika. Pertama, Raperda tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal. Kedua, Raperda tentang Perlindungan Seni Budaya. Ketiga, Raperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masya-

rakat Hukum Adat. Keempat Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Riziko. Kelima, Raperda tentang Penanaman Modal. Keenam, Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Ketujuh, Raperda tentang Penyerataan Modal Pemda pada Badan Usaha Milik Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Kedelapan, Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Bupati Omaleng menjelaskan, pentingnya dibentuk Perda seperti Raperda perlindungan dan penempatan tenaga kerja lokal yang didasarkan pada Undang Undang Otonomi Khusus dimana ketenagakerjaan jadi urusan wajib yang kewenangan penyelenggaraan diserahkan ke Pemda Kabupaten/ Kota. (BAPPEDA)



Foto: Bappeda

**Bupati Mimika, Eltinus Omaleng menyerahkan materi Raperda non APBD kepada Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng didampingi Wakil Ketua I DPRD Mimika, Aleks Tsenawatme.**

# Disetujui DPRD, Pemkab Mimika Segera Registrasi 8 Perda

**D**EWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika akhirnya menyetujui dan menetapkan delapan usulan Raperda dari Pemerintah Kabupaten Mimika menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan itu disampaikan tujuh fraksi dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang III DPRD Kabupaten Mimika tentang Pembahasan Raperda Non APBD yang digelar Kamis (17/11/2023).

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng dan Wakil Ketua I, Aleks Tsenawatme dihadiri lebih dari setengah anggota DPRD. Tujuh fraksi juga memberikan pandangan akhir dan menyetujui penetapan 8 Perda yang diajukan oleh Pemkab Mimika.

Delapan Raperda tersebut yakni Raperda tentang

Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal. Raperda tentang Perlindungan Seni dan Budaya. Raperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Raperda tentang Penanaman Modal. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Raperda tentang Penyerataan Modal Pemerintah Kabupaten Mimika pada BUMD PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pj Sekda Mimika, Robert Mayaut yang hadir mewakili Bupati Mimika memberikan apresiasi kepada DPRD Mimika yang telah membahas dan menyetujui penetapan delapan Raperda. Selanjutnya, Pemkab Mimika akan mengajukan surat permintaan/permohonan nomor



**Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng menyerahkan materi hasil kesepakatan kepada Pj Sekda Mimika, Robert Mayaut.**



register kepada Gubernur Provinsi Papua Tengah melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah.

Khusus untuk Raperda Pajak dan Retribusi Daerah, dengan dasar persetujuan bersama maka Pemkab Mimika tidak hanya menyampaikan ke Gubernur Papua Tengah tapi juga Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk dievaluasi lebih lanjut. (BAPPEDA)





# Bupati Mimika Pimpin Deklarasi Pemilu Damai 2024



**S**ELURUH elemen yang ada di Kabupaten Mimika menyatakan dukungan Pemilu Damai Tahun 2024. Hal itu ditandai dengan dibacakan dan ditandatanganinya deklarasi damai yang dipimpin langsung oleh Bupati Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH pada Minggu (26/11/2023) di Graha Eme Neme Yauware.

Deklarasi damai ini juga ditandatangani KPU, Bawaslu, TNI, Polri, partai politik, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama yang ada di Kabupaten Mimika.

Ada enam poin deklarasi damai Pemilu 2024. Pertama, siap mengikuti dan mensukseskan Pemilu Tahun 2024 secara jujur, adil, santun dan bermartabat. Kedua, siap bekerja sama dan mengawasi bersama penyelenggara pemilu, untuk mencegah dan menghindari isu sara, berita hoaks dan ajakan yang bersifat provokasi.

Ketiga, bekerja sama dengan aparat keamanan dalam hal ini TNI dan Polri untuk menjaga situasi daerah agar tetap selalu kondusif aman dan damai pada pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Mimika serta dapat mengendalikan massa pendukung masing-masing dan mendukung sepenuhnya tindakan tegas aparat penegak hukum sesuai dengan



2. Siap bekerja sama dengan aparat Keamanan...
3. Siap bekerja sama dengan aparat Keamanan... serta dapat mengendalikan massa pendukung masing-masing dan...
4. Siap menerima Keputusan dari Penyelenggara ttg hasil Pemilu 2024. Sesuai dengan Peraturan...
5. Siap mewujudkan Pemilu 2024 di Kabupaten Mimika berjalan secara Baik dengan Menolak Pro...
6. Siap menolak politik identitas yang mengarah kepada ujaran kebencian.

**Sambutan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng saat deklarasi Pemilu Damai 2024**

Foto: Bappeda



ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia

Keempat, siap menerima keputusan dari penyelenggara tentang hasil Pemilu 2024, sesuai dengan peraturan KPU secara jujur, adil dan bermartabat.

Kelima, siap mewujudkan Pemilu 2024 di Kabupaten Mimika berjalan secara baik dengan menolak praktek money politik yang akan merusak proses demokrasi secara utuh. Dan keenam siap menolak politik identitas yang mengarah kepada ujaran kebencian.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng mengatakan pemilihan umum serentak tahun 2024 sebagai agenda pesta demokrasi terbesar, karena itu, potensi kerawanan serta upaya kerja keras semua pihak dalam mensukseskan menjadi catatan penting terutama di Kabupaten Mimika.

"Untuk itu yang perlu diingatkan di Pemilu 2024 mendatang, selain memilih calon anggota DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, pada saat yang akan berlangsung pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak seluruh Indonesia di tahun yang sama.

Dan dalam pelaksanaannya akan mengha-





dapi berbagai potensi permasalahan atau kerawanan, mulai dari persiapan kebutuhan/ anggaran, data pemilih, distribusi logistik pemilu, kapasitas dan beban calon terpilih.

“Maka diperlukan perhatian, usaha dan kerja keras dari semua pihak dengan upaya dan kerja keras bersama untuk mengantisipasi potensi permasalahan pemilu 2024 sehingga menjadi pesta demokrasi yang demokratis, maka deklarasi pemilu damai ini harus mendapat kesepakatan bersama oleh semua pihak di Kabupaten Mimika,” tegasnya.

Untuk itu Bupati Omaleng menitipkan kepada semua pihak baik itu dari penyelenggara, peserta, unsur TNI dan Polri serta satuan kerja perangkat daerah, untuk menjaga marwah Pemilu dan seluruh proses tahapan kegiatan Pemilu ini dengan bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusifitas lingkungan sehingga pelaksanaan pesta demokrasi di Tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar. (BAPPE-DA)



**Bupati Mimika, Eltinus Omaleng bersama pihak terkait melakukan deklarasi Pemilu Damai 2024**

Foto: Bappeda

# Bupati Jadi Inspektur Upacara HUT ke-52 KORPRI



**K**ORPRI Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang menaungi 4,4 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-52. Di Kabupaten Mimika, puncak HUT KORPRI diperingati dalam bentuk upacara di Lapangan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika pada Rabu

(29/11/2023).

Bupati Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH bertindak sebagai Inspektur Upacara dan Septinus Marandof, Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Komandan Upacara. Turut hadir Forkopimda, pimpinan OPD dan tamu undangan serta para pegawai dan honorer.

Pada momen ini Bupati Mimika menyerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada 10 ASN. Di antaranya yang mengabdikan 30 tahun yakni Drs Ananias Faot, MSi, Alice Irene Wanma, SKM dan Fransiskus Bokeyau, SPd. Kemudian 20 tahun masa kerja yakni Slamet Sutejo, SSTP MSi, Herlina Imea, SIP MSi dan Fransiska Tekege, ST. Masa kerja 10 tahun, Dr Antonius Pasulu, SP THT-KL, MKes, Betriks Pademme, SS MSi, Abdul Azis, SE dan Jeni Timang, SPt, MSi.

Bupati Omaleng memberi apresiasi kepada seluruh ASN yang telah mendukung dan melaksanakan program yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Seperti penanganan Covid-19, pengendalian inflasi dan penanganan stunting.

Sementara itu, menghadapi pemilihan umum Tahun 2024, Bupati berharap agar KORPRI turut mendukung pesta demokrasi tersebut. "Saya percaya bahwa KORPRI sebagai organisasi yang sudah berkali-kali menghadapi Pilpres dan Pilkada sudah sangat paham dan terlatih untuk tetap berada dalam posisi netral dan tegak lurus dengan Negara, Pancasila dan UUD 1945," ujarnya. (BAPPEDA)



**Bupati Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH menyerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada Alice Irene Wanma, SKM**

Foto: Bappeda

# Jhon Rettob Diaktifkan Kembali jadi Wakil Bupati Mimika

**S**ETELAH melalui proses hukum selama berbulan-bulan dan akhirnya dinyatakan bebas oleh Pengadilan Tipikor Jayapura, Johannes Rettob, SSos MM yang sempat dinonaktifkan oleh Menteri Dalam Negeri kini diaktifkan kembali.

Melalui undangan yang berdar dari Gubernur Papua Tengah, yang dituju-

kan kepada John Rettob disebutkan bahwa pengaktifan akan dilaksanakan di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah pada Selasa (21/11/2023).

Pengaktifan ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6153 Tahun 2023 tentang pengangkatan kembali Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah.

John Rettob sendiri pada awal dinonaktifkan sempat menolak dan menyatakan kebijakan penempatan Penjabat Bupati Mimika mengisi kekosongan kepemimpinan di Mimika adalah kebijakan yang salah oleh Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur Papua. Pernyataan itu ia sampaikan lewat video yang kemudian tersebar.(BAPPEDA)



Foto: Bappeda

Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk memberi ucapan selamat kepada Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob



# Bupati Mimika Eltinus Omaleng Wisuda Doktor Universitas Trisakti

**B**UPATI Mimika, Eltinus Omaleng, SE MH resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum setelah menjalani Wisuda Program Doktor Universitas Trisakti yang digelar Selasa (7/10/2023) di Plenary Hall Jakarta Convention

Center.

Eltinus Omaleng dikukuhkan oleh Rektor Universitas Trisakti, Prof Dr Ir Kadarsah Suryadi, DEA yang didampingi para dekan dari semua fakultas. Bupati Mimika ini diwisuda bersama 2324

lulusan semester genap Universitas Trisakti.

Didampingi ketiga putranya Alexander Omaleng, Albert Omaleng dan Diof Omaleng, Bupati Eltinus Omaleng tampak begitu gembira. Apalagi ia mendapat





predikat cumlaude dari salah satu universitas terbaik di Indonesia.

Bupati Omaleng merasa bangga karena akhirnya bisa mendapatkan gelar doktor setelah menjalani proses perkuliahan selama kurang lebih tiga tahun. Saat sedang menghadapi proses hukum, Bupati Omaleng tetap aktif berkuliah secara virtual. Bahkan ia melakukan ujian dan yudisium saat masih dalam proses hukum.

Rektor Universitas Trisakti, Prof Dr Ir Kadarsah Suryadi, DEA mengungkapkan dengan diwisudanya 2324 wisudawan kali ini maka total lulusan Universitas Trisakti sejak didirikan sudah mencapai 158.152 orang. Sedangkan total lulusan doktor sebanyak 938 orang. (BAPPEDA)





# Menteri Pertahanan Resmikan RS Kesdam Cenderawasih di Mimika



**S**ETELAH 27 tahun, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto kembali menginjakkan kaki di Kabupaten Mimika. Kunjungannya pada Jumat (10/11/2023) dalam rangka meresmikan RS Tk IV Timika Kesdam XVII/ Cenderawasih serta menyerahkan motor bagi babinsa.

Prabowo mengatakan rumah sakit yang baru dibangun di Mimika dalam rangka kepentingan TNI tapi juga terbuka untuk masyarakat umum. "Itu tradisi TNI, bila mana diperlukan akan diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat," katanya.

TNI ditegaskannya, adalah tentara rakyat sehingga fasilitas yang dimiliki TNI diperuntukkan bagi rakyat. Pembangunan RS TNI kata Prabowo, akan dilakukan di setiap kabupaten. Pada akhir Tahun 2023 ini ada 26 dan tahun depan akan ditambah 20 rumah sakit.

"Sehingga di setiap kabupaten harus ada rumah sakit yang moderen, fasilitasnya cukup sehingga prajurit, ASN dan rakyat tidak jauh-jauh tapi ada pelayanan kesehatan dekat dengan mereka," katanya.

Apalagi kata dia, masyarakat khususnya Suku Kamoro yang ada di Mimika yang puluhan tahun setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia terus membuktikan kesetiannya dengan menghibahkan ribuan hektar tanah untuk negara. Untuk itu Prabowo memberikan hadiah berupa dana sebesar Rp 5 miliar bagi masyarakat Suku Kamoro.

Selain meresmikan rumah sakit, Prabowo juga menyerahkan 79 unit sepeda motor bagi babinsa. Ia mengungkapkan, jumlah motor yang dibagikan sebanyak 1720 unit untuk Babinsa di seluruh Indonesia. Penyerahan dilaku-





kan bertahap bahkan di beberapa tempat akan diberikan motor listrik produksi dalam negeri yakni PT Pindad.

Kata Prabowo, ini sebagai salah satu dukungan TNI dalam mendukung energy hijau, energy terbarukan untuk mengurangi polusi dan biaya BBM. "Di tempat tertentu pakai tenaga surya, charger pakai tenaga surya supaya kebutuhan BBM kita terjangkau seluruh unsur," terangnya.

Bantuan ini lanjutnya, sebagai bentuk penghargaan kepada aparat yang mengabdikan di wilayah terpencil. "Kita ikuti permintaan dari satuan bawah, dari pengguna, mereka yang di depan mereka yang bekerja keras untuk rakyat, mereka yang mengabdikan untuk bangsa, mereka yang tahu kebutuhan mereka jadi kita berusaha penuhi kebutuhan yang ada di bawah," jelasnya.

(BAPPEDA)



Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto saat meresmikan RS Tk.IV Timika Kesdam XVII/Cenderawasih.

Foto: Bappeda



**Perbaikan Jembatan  
Menuju Kampung Mulia  
Kencana SP 7**



Foto: Bappeda



Pembangunan Jalan  
Mayon



Foto: Bappeda



Pembangunan Jembatan Iwaka



Pembangunan Jalan



Foto: Bappeda



Pelabuhan Rakyat di Pomako

Foto: Bappeda

# Bappeda Mimika Kaji Efektifitas dan Efisiensi Dana Desa

**S**EJAK digulirkan untuk pertama kalinya pada Tahun 2015 lalu, sudah ratusan miliar bahkan mungkin triliunan dana desa yang mengalir ke 133 kampung yang ada di Kabupaten Mimika. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana desa maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan kajian.

Kajian dilakukan dengan mengambil tujuh kampung sebagai sampel dari tiga distrik. Kampung Uta dan Mupuruka di Distrik Mimika Barat Tengah. Kampung Amole dan Kampung Damai di Distrik Kwamki Narama. Kampung Wenin, Sempan Timur dan Noema di Distrik Jita.

Kampung ini dipilih, selain karena keterbatasan sumber daya tapi juga menurut Sekretaris Bappeda, Joseph Manggasa bahwa tujuh kampung ini mewakili wilayah pesisir dan perkotaan. "Itu yang jadi sampel kita dan secara umum kita bisa jadikan rujukan untuk kampung-kampung lain, karena ini ada keterwakilan kota dan pesisir. Kampung ini kita harapkan mewakili kampung lain," jelasnya.

Kajian ini melibatkan Pusat Kajian Ekonomi dan Pembangunan Daerah Universitas Cenderawasih. Dari hasil kajian, ada beberapa hal yang menjadi catatan mulai dari perencanaan, monitoring dan evaluasi sampai pelaporan.

Koordinasi dengan stakeholder dika-takan Joseph juga harus ditingkatkan mulai dari perencanaan. Menyatukan persepsi dan mendefinisikan kebijakan pusat sesuai dengan kebutuhan daerah dan permasalahan yang ada di Kabupaten Mimika untuk dijadikan petunjuk teknis.

Termasuk juga koordinasi dengan OPD pelaksana dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung bersama kepala distrik yang harus duduk bersama menyatukan persepsi dalam perencanaan. "Begitu pula di distrik perlu adanya monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan dana desa di kampung," terang Joseph. **(BAPPEDA)**



# Pemkab Mimika Fokus Selesaikan Persoalan Lima Bidang Tanah

**P**EMERINTAH Kabupaten Mimika sedang fokus menyelesaikan lima bidang tanah yang digunakan untuk kepentingan pembangunan. Lima bidang tanah ini masih bermasalah sehingga Tim Terpadu Penanganan Masalah Pertanahan yang terdiri dari unsur Pemkab Mimika, Kejaksaan Negeri Mimika, Pengadilan Negeri Kota Timika, Polres Mimika dan Badan Pertanahan kembali melakukan pertemuan untuk mencari solusi penyelesaian.

Pertemuan yang digelar Selasa (28/11/2023) dipimpin oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Willem Naa dan dihadiri anggota tim terpadu. Dalam pertemuan itu membahas terkait mekanisme penyelesaian agar pembangunan bisa berjalan.

Lima titik lahan yang masih bersengketa yakni Jalan Petrosea tembus Bandara Mozes Kilangin. Lahan yang akan dibangun jalan dengan lebar 40 meter dan panjang hampir 800 meter tersebut terdapat lima pemilik sertifikat.

Proses pembebasan sudah dilakukan sejak Tahun 2019 dengan melibatkan appraisal atau jasa penilai. Namun pemilik tidak setuju dengan nilai yang ditetapkan appraisal.

Penilaian kembali dilakukan Tahun 2022 lalu karena setelah dua tahun, hasil appraisal dianggap kedaluwarsa. Setelah hasilnya keluar, hanya empat orang yang setuju. Sementara satu pemilik menuntut pembayaran Rp2,5 miliar karena meminta nilai tanah seharga Rp 2,5 juta per meter persegi. Sementara empat pemilik lainnya sudah dibayar dengan harga Rp 500 ribu per meter persegi.

Pembangunan jalan Petrosea – Bandara sudah mulai dilakukan tapi terhenti karena salah seorang pemilik yakni Yuliana Beanal masih menolak dan tetap menuntut pembayaran Rp2,5 miliar.

Lokasi tanah kedua yakni tanah Bandara Mozes Kilangin tepatnya pada bundaran yang sampai saat ini pembangunannya belum bisa diselesaikan karena ada warga yang mengklaim

sebagai pemilik. Padahal tanah tersebut sudah dibebaskan tapi pada orang yang berbeda.

Lahan SD Negeri 5, SD Negeri 2 dan SD Kwamki II juga sampai saat ini masih bermasalah. Persoalannya, Dinas Pendidikan ingin menambah ruang kelas tapi terkendala dengan guru lama yang tinggal dan tidak mau mengosongkan rumah dinas lama.

Tanah Bundaran Petrosea juga rupanya masih bersengketa yang diklaim oleh Helena Beanal. Padahal berdasarkan catatan Pemkab Mimika, tanah tersebut masuk dalam sertifikat PT Petrosea.

Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Mimika, Yulianus Waramuri mengatakan langkah yang akan ditempuh oleh tim adalah pendekatan secara persuasif kepada para pemilik tanah. Proses mediasi juga terus dilakukan oleh Kepolisian dan unsur terkait agar pembangunan berjalan dan pemilik tanah bisa mematuhi aturan yang berlaku. **(BAPPEDA)**



Foto: Bappeda

# Eltinus Omaleng Open Tournament 2023

**BUPATI** Mimika, Dr. Eltinus Omaleng, S.E., M.H., secara simbolis melakukan pukulan pembuka sebagai tanda dimulainya pagelaran Kejuaraan Badminton Eltinus Omaleng Open Turnament 2023 dengan tema “Junjung Tinggi Sportifitas”. Pembukaan dan pertandingan dilangsungkan di Gedung Eme Neme Yauware, Minggu (12/11/2023) di Timika, Papua Tengah.

Pada kesempatan itu Bupati Mimika, Dr. Eltinus Omaleng, S.E., M.H., dalam sambutannya mengatakan bahwa bulutangkis adalah salah satu cabang olahraga yang banyak diminati oleh masyarakat dari semua

kalangan.

“Saya ingin generasi muda kita yang ada di Mimika, yang mempunyai bakat dalam olahraga ini untuk semakin di asa dengan baik, hal ini juga sangat baik apabila *PBS/Kabupaten Mimika* bisa turut menjangkau anak-anak muda Mimika yang serius untuk mengembangkan bakat mereka di dunia olahraga bulutangkis,” ungkapnya.

Bupati mengapresiasi panitia dan seluruh pihak yang berkontribusi demi terselenggaranya kejuaraan ini sebagai upaya untuk menggeliatkan olahraga bulutangkis di Kabupaten Mimika yang pada akhirnya diharap-

kan bisa meningkatkan kualitas dan prestasi olahraga bulu tangkis.

Eltinus juga menyampaikan, bahwa kejuaraan ini akan meningkatkan kemampuan atlet, tak hanya dari segi teknik tetapi juga mental.

“Kepada seluruh pemain, pelatih, dan official, saya ucapkan terima kasih telah turut berpartisipasi dalam event ini. Dan kepada seluruh atlet-atlet bulutangkis yang akan bertanding pada kejuaraan ini, saya yakin kalian semua berpotensi menjadi juara. Kalian semua adalah calon-calon atlet berprestasi yang akan mengharumkan nama Kabupaten Mimika di kanca Nasional bahkan



Foto: Bappeda



**Bupati Mimika, Dr. Eltinus Omaleng, S.E., M.H., secara simbolis melakukan pukulan pembuka sebagai tanda dimulainya pagelaran Kejuaraan Badminton**

Foto: Bappeda

Internasional,” harapnya.

Eltinus juga berpesan kepada seluruh atlet agar bermain dengan sportif dan jujur, karena sikap jujur dan sportif tentu saja akan membawa efek positif terhadap jalannya kejuaraan ini sampai pada selesainya nanti.

Dalam kegiatan ini selain Bupati Mimika, turut hadir Pj. Sekda Mimika, Asisten, Pimpinan OPD pada lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika, DPRD Mimika, Ketua KONI, undangan serta para peserta kejuaraan. (BAP-PEDA)



# Bupati Buka Kompetisi Askab PSSI Mimika



**A**SOSIASI Kabupaten Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (Askab PSSI) Mimika kembali menggelar kompetisi Bupati Cup Tahun 2023. Kompetisi dibuka secara resmi oleh Bupati Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH pada Sabtu (25/11/2023) di Stadion Wania Imipi SP 1 ditandai dengan tendangan pertama.

Turut hadir dalam pembukaan Ketua Harian KONI Mimika, Simon Kasamol serta Forkopimda dan tamu undangan.

Ketua Askab PSSI Mimika, Nalio Jangkup dalam sambutannya mengatakan kompetisi diikuti 19 klub yang ada di Mimika. Tujuannya, bukan sekadar kompetisi tapi sebagai ajang menjalin persaudaraan dan silaturahmi pemain sepakbola di Mimika.

Selain itu, kompetisi ini juga untuk mencari pemain yang siap di Persemi Mimika, klub sepakbola kebanggaan masyarakat Mimika. "Kami juga akan memilih pemain terbaik untuk ikut dalam kompetisi Pra PON," katanya.

Panitia kata dia, sudah menyiapkan hadiah berupa piala untuk juara 1, 2, 3, dan harapan. Serta uang pembinaan sebesar Rp 25 juta untuk juara 1, Rp 15 juta untuk juara 2, Rp 10 juta untuk juara 3 dan Rp 5 juta untuk juara harapan.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng mengatakan ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Mimika dalam meningkatkan prestasi olahraga di Mimika. Untuk itu ia mendorong semua perangkat untuk melakukan pembinaan intensif dan menggali talenta atlet berbakat di Mimika.



**Bupati Mimika, Eltinus Omaleng melakukan tendangan pertama tanda dibukanya Kompetisi Askab PSSI Mimika Bupati Cup 2023 di Stadion Wania Imipi, Kelurahan Kamoro Jaya SP 1 pada Sabtu (25/11/2023).**

Kepada para pemain, Bupati meminta agar bersaing secara sehat dan menampilkan performa terbaik. Menjadikan ajang pertandingan momentum saling mendukung, menjauhi konflik dan kerusuhan yang merugikan. “Selain ajang kejuaraan dan hiburan, kompetisi ini juga sebagai tolok ukur perkembangan olahraga sepakbola di Mimika,” tandasnya.

Bupati menekankan bahwa kompetisi ini bukan hanya sekadar meraih prestasi tapi yang paling penting menumbuhkan rasa persaudaraan dan persatuan serta cara mengharumkan bakat atlet. Juga menjadi ajang mencari pengalaman dan pelajaran dalam mengembangkan potensi diri para generasi muda serta memupuk persaudaraan dan menumbuhkan semangat pemuda sebagai tulang punggung bangsa dan negara.

“Menang atau kalah bukan yang utama tetapi yang penting jaga sportivitas dan kedepankan profesionalisme,” terangnya. **(BAPPEDA)**



Foto: Bappeda



# Seruan Bupati Mimika Terkait Kamtibmas

**B**UPATI Mimika, Eltinus Omaleng menggelar pertemuan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pertemuan yang digelar Kamis (30/11/2023) di Hotel Cenderawasih 66 itu dalam rangka memberi pengarahan kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di Mimika.

Ada beberapa poin yang menjadi poin arahan yakni terkait isu keamanan jelang 1 Desember, perayaan natal dan persiapan jelang pemilihan umum yang

sudah memasuki tahapan kampanye.

Terkait peringatan 1 Desember, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng berharap agar kondisi keamanan di Mimika yang dalam beberapa tahun terakhir sudah kondusif terutama minimnya gangguan dari kelompok kriminal bersenjata harus dipertahankan. "Saya harap jangan lagi ada terjadi di sekitar Mimika mulai dari gunung sampai pantai," katanya.

Apalagi kata dia, sudah memasuki tahapan pemilu sehingga berbagai hal meskipun sifatnya kecil harus dimini-

malisir karena dampaknya sangat besar. Sebab Mimika selalu menjadi pusat perhatian ketika terjadi gesekan. "Kita pastikan bahwa Mimika tetap aman," tandasnya.

Untuk itu Bupati Omaleng mengajak semua pihak untuk bekerja sama dengan TNI dan Polri. Jika melihat adanya potensi gangguan harus dilaporkan bukan dibiarkan. Dengan begitu maka nyawa manusia bisa diselamatkan. Jika dibiarkan itu sama saja membiarkan adanya pembunuhan.



Terutama tokoh gereja yang ada di pedalaman yang menurutnya sangat berperan penting dalam membantu terciptanya keamanan. “Kita punya masyarakat ada dimana-mana, tolong sampaikan jangan ada gerakan yang bisa mengganggu keamanan,” ujar Bupati Omaleng.

Menyangkut Pilkada, Bupati mengingatkan agar berbabagi pihak harus berhati-hati. Selama ini Mimika selalu disebut daerah rawan konflik pemilu tapi dari pengalaman sebelumnya Mimika bisa menyelenggarakan pesta demokrasi dengan situasi yang kondusif. “Kalau kita sepakat duduk seperti ini pasti Pemilu akan damai. Tetap jaga ketertiban dan mengamankan Kabupaten Mimika,” katanya. (BAPPEDA)



**Bupati Mimika, Eltinus Omaleng bersama Forkopimda saat pertemuan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.**



# 498 CPNS dan CP3K Formasi Honorer di Mimika Ikuti Diklat Prajabatan



**S**ETELAH melalui proses panjang sejak Tahun 2021 lalu, sebanyak 498 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CP3K) akhirnya mengikuti diklat prajabatan dan orientasi setelah menerima SK pengangkatan.

Diklat yang secara resmi dibuka oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng di Gedung Tongkonan IKT pada Kamis (30/11/2023) itu diikuti 343 CPNS dan 155 CP3K. ditambah 10 orang CPNS formasi Tahun 2013 dan Tahun 2019 yang baru mengikuti diklat.



Bupati Mimika mengatakan PNS maupun PPPK merupakan bagian dari ASN yang telah memenuhi syarat dan diangkat berdasarkan surat keputusan. Setelah menerima SK, CPNS dan CPPPK wajib mengikuti diklat prajabatan dan orientasi sebagai langkah percepatan penyesuaian diri bagi peserta.

Bupati mengungkapkan 498 CPNS dan CPPPK ini adalah bagian dari 20 ribu formasi afirmasi yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk Papua pada Tahun 2021 lalu. Kabupaten Mimika awalnya mendapat kuota hanya 300 tapi Bupati meminta tambahan jadi 600.

Dalam proses pengangkatan Bupati mengambil kebijakan dengan memprioritaskan honorer orang asli Papua. Sehingga untuk CPNS dari 343, 288 diantaranya adalah OAP dan 55 non OAP. Sementara PPPK sebanyak 112 adalah OAP dan 43 adalah non OAP.

Dijelaskan, dari 600 kuota ada 595



**Bupati Mimika, Eltinus Omaleng menyematkan kartu tanda peserta bagi CPNS dan CPPPK yang mengikuti diklat dan orientasi.**





yang ditetapkan oleh Menpan RB. Kemudian ada 528 yang mengikuti pelaksanaan tes CAT. Dalam penyelesaian administrasi sampai dengan penetapan NIP sebanyak 498 orang. Sedangkan 30 orang lainnya masih dalam proses penetapan NIP dan per-

baikan melalui aplikasi dan koordinasi dengan BKN Kanreg IX Jayapura dan Menpan RB sehingga hasilnya akan menyusul bersama dengan sisa formasi lainnya.

Kepala BKPSDM Mimika, Ananias Faot menambahkan Kabupaten Mimi-

ka masih memiliki kuota 274 CPNS formasi umum Tahun 2021. Rencananya formasi ini akan dibuka pada awal Tahun 2024 mendatang karena formasi khusus dan seleksi PPPK yang sementara berlangsung akan dituntaskan terlebih dahulu. (BAPPEDA)



**Peserta CPNS dan CP3K Formasi Honorer di Mimika Ikuti Diklat Prajabatan**

Foto: Bappeda

# 2.304 CPPPK di Mimika Jalani Tes CAT

**T**AHAPAN seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) di 26 kabupaten/kota di Papua kini memasuki proses Computer Assisted Test (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional IX Jayapura.

Di Kabupaten Mimika ada sebanyak 2.304 pelamar yang mengikuti tes yang dipusatkan di laboratorium SMP Negeri 2 Mimika. Tes dijadwalkan berlangsung selama 7 hari, peserta dibagi dalam beberapa sesi setiap hari. Pada hari pertama, Kamis (23/11/2023), merupakan jadwal formasi tenaga kesehatan.

Adapun pelamar CPPPK di Mimika sebanyak 2.304. Terdiri dari 1.653 jabatan fungsional kesehatan dan 651 jabatan fungsional guru. Dari 651 jabatan fungsional guru terdapat 335 yang termasuk kategori prioritas sehingga tidak lagi mengikuti tes karena sudah dinyatakan lulus passing grade pada seleksi tahap 1 dan 2 sebelumnya. Jadi yang mengikuti seleksi CPPPK ada 1.969 orang pelamar dan terdapat 85 orang peserta mengikuti tes di luar Kabupaten Mimika. Jadi ada 1.884 peserta yang tes di Mimika.

Terkait peserta yang memilih lokasi tes di luar Mimika, diterangkan Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura, Sabar P Sormin yang hadir membuka sekaligus memantau jalannya tes di Mimika mengatakan itu tidak menjadi masalah. Untuk itu BKPSDM Mimika harus mengirimkan surat pelimpahan ke BKN dimana pelamar memilih lokasi tes agar dimudahkan.

Sabar mengungkapkan, tes pelamar PPPK dilaksanakan serentak. Hanya ada empat instansi yang tidak mengambil formasi yakni Provinsi Papua, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Nduga dan satu kabupaten lain. "Jadi hanya



Para pelamar CPPPK di lingkup Pemkab Mimika bersiap mengikuti tes CAT.



26 kabupaten/kota, jadi mulai hari ini serentak. Seperti Yalimo di Wamena hanya satu sesi gabung dengan Jayawijaya," jelasnya.

Ia mengakui ada banyak formasi yang tidak ada pelamar. Terutama di beberapa daerah pegunungan. Namun di Mimika jumlah pelamar jauh lebih banyak. Sehingga pelamar harus berkompetisi mencapai passing grade yang ditentukan di tiga sub tes yakni tes kompetensi manajerial, kompetensi teknis

dan wawancara.

Kelulusan PPPK ini tidak mutlak dari passing grade. Dikatakan Sabar, ada Permenpan yang memberikan prioritas kepada pelamar yang memang sudah lama bekerja atau honorer dan usia yang sudah lebih dari 35 tahun. "Setelah nilai tertinggi, ketika sama-sama maka yang bekerja itu yang didahulukan dan usia yang memang 35 tahun ke atas walaupun nilainya lebih tinggi dari yang sudah bekerja," terangnya. **(BAPPEDA)**

# Bupati Mimika Sumbang 100 Ekor Babi Untuk Syukuran Gereja Rehobot

**S**UDAH 28 tahun lamanya, Gereja KINGMI Rehobot yang berada di Jalan Agimuga, Mile 32 berdiri. Gereja ini didirikan dan melayani umat yang dipindahkan dari Kampung Banti, Distrik Tembapapura yang membuat pemukiman di wilayah Mile 32.

Bangunan gereja yang terbuat dari material kayu masih berdiri kokoh. Ukurannya tak berubah sejak dibangun. Terbilang kecil untuk sebuah gereja yang umatnya ratusan bahkan ribuan. Inilah yang mendorong Bupati Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH membangun gedung gereja baru tak jauh dari Gereja Rehobot.

Ya, Gereja KINGMI Jemaat Marthen Luther atau lebih sering disebut Gereja Mile 32. Dari sisi fisik gedung, kedua gereja ini sangat berbeda. Bupati meny-

atakan ini sebuah nazarnya setelah menjabat. Akhirnya bisa terwujud meskipun belum rampung 100 persen tapi ruang paling bawah kini sudah bisa digunakan untuk beribadah bahkan tempat pertemuan. Beberapa kegiatan akbar pernah digelar di Gereja KINGMI Mile 32 salah satunya Konferensi Gereja KINGMI di Tanah Papua.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng berharap seluruh umat sudah bisa berpindah ke Gereja Marthen Luther untuk beribadah. Sementara lokasi Gereja Rehobot akan dibangun pusat pendidikan theologia serta Kantor Sinode Gereja KINGMI di Tanah Papua. "Sekolah pusat theologia harus ada di Timika," tegas Bupati Omaleng.

Sebagai bentuk ucapan syukur atas

keberadaan Gereja Rehobot dan akan berpindahnya umat ke Gereja Marthen Luther maka, panitia menggelar pesta adat bakar batu. Bupati Mimika, Eltinus Omaleng bahkan mempersembahkan 100 ekor babi untuk dibakar dan disajikan kepada umat yang menghadiri acara syukur.

Sementara itu mewakili Badan Pekerja Klasis Mimika, Pdt Anton Uamang menyambut baik rencana Bupati Mimika membangun sekolah tinggi theologia di Mimika tepatnya di lokasi Gereja Rehobot Mile 32.

Untuk itu ia mengajak seluruh umat mendukung rencana ini agar segera terwujud. Dari badan pekerja klasis akan segera melakukan penataan pelayanan terhadap Jemaat Rehobot yang bergabung



Foto: Bappeda



Foto: Bappeda

dengan Jemaat Marthen Luther agar umat bisa dilayani dengan maksimal.

Sementara itu tokoh masyarakat, Yanes Natkime mengatakan gereja ini dibangun oleh umat yang pindah dari Utikini ke

Banti, kemudian dari Banti ke Timika. Tapi selama 28 tahun sejak didirikan tidak pernah ada acara syukuran. Sehingga kali ini ada acara syukuran bersama umat.

Meski bangunannya kecil, tapi Jemaat

Rehobot telah melahirkan kader yang menjadi tokoh besar. Seperti Bupati Mimika, Eltinus Omaleng yang sudah dua periode memimpin Mimika. "Gereja ini kecil tapi hasilnya luar biasa. Dari gereja ini lahirkan pemimpin di Kabupaten Mimika," tegasnya. **(BAPPEDA)**



Foto: Bappeda

# ASN Pemkab Mimika Jaga Netralitas Pada Pemilu

**B**ADAN Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika terus gencar melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 14 Februari 2024 maupun Pemilukada pada November 2024.

Kali ini Badan Kesbangpol Mimika memberikan sosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang pentingnya netralitas dari aparatur pemerintahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mimika. Sosialisasi digelar Kamis (16/11/2023) di Hotel Grand Tembaga Timika.

Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Pemkab Mimika, Septinus Timang saat membuka kegiatan menekankan pentingnya netralitas ASN dalam Pemilu. Sebab ASN adalah aparatur pemerin-

tahan yang bisa saya menyalahgunakan kewenangan, kedudukan dan jabatan dalam mendukung salah satu figur.

Ini jelas kata Septinus, melanggar aturan sehingga karir ASN bisa terancam. Sebab, dalam undang-undang tentang ASN sudah jelas mengatur bahwa ASN tidak boleh terafiliasi atau terlibat dalam politik praktis.

Menurutnya, dalam pemilu seperti pemilihan caleg atau Pilpres memang tidak begitu Nampak. Tapi saat pemilihan bupati, terkadang ASN secara terang-terangan menunjukkan arah dukungan politiknya kepada salah satu pasangan calon. "Kalau kita berani seperti itu maka risikonya kalau yang didukung kalah maka bersiap dalam lima tahun tidak dapat jabatan," katanya.

Untuk itu ia mengimbau ASN agar dalam tahapan Pemilu dan Pemilukada tetap bersikap netral. Meskipun memiliki hak memilih tapi harus tetap menunjukkan netralitas karena jika terlibat secara langsung bisa mengorbankan karir sendiri.

Termasuk kata Septinus, dalam penggunaan sosial media, ASN harus berhati-hati. Begitu pula dalam ruang diskusi seperti WhatsApp Group, seorang ASN tidak boleh bertindak berlebihan. Bahkan gaya saat berfoto pun kata dia sudah diatur, tidak boleh menunjukkan pose yang mengarah pada dukungan pada salah satu pasangan calon. "Tetap netral, siapapun pemimpin kita itu harus kita dukung dalam menjalankan tugas pemerintahan," tandasnya. (BAPPEDA)



ASN di lingkup Pemda Kabupaten Mimika

**Gilbert  
Daniel  
Worabay  
bersama  
guru, pelatih  
dan ibunya.**



Foto: Bappeda

# Siswa SMPN 10 Mimika Wakili Papua Tengah di Pra PON Cabor Panahan

**C**ABANG olahraga panahan tidak masuk dalam wild card bagi Provinsi Papua Tengah. Untuk itu Papua Tengah harus mengikuti kualifikasi lewat Pra PON yang akan diselenggarakan pada 18-27 November 2023 di Stadion GOR Pajajaran Bandung.

Untuk ajang tersebut, Papua Tengah menyiapkan 13 atlet, enam diantaranya berasal dari Mimika. Salah satu atlet dari Mimika yang akan mewakili Papua Tengah adalah Gilbert Gerald Daniel Worabay, siswa SMP Negeri 10 Mimika.

Gilberth yang kini duduk di kelas VIII SMP Negeri 10 Mimika akan bermain di kategori compound, salah satu nomor pertandingan panahan dari jarak 50 meter. Nomor ini adalah kategori yang dipertandingkan pada Asian Games dan Olimpiade.

Pelatih Kepala Panahan, Leo megatakan nomor pertandingan ini sebenarnya pertama kali dimainkan oleh Gilbert. Dalam kejuaraan baik lokal maupun nasional, Gilbert selalu memainkan kelas standar tapi untuk Pra PON ia

akan bermain di kelas Compound. Sementara 12 atlet lainnya akan bermain di kelas standard bow.

Untuk itu sebelum berangkat pada 15 November mendatang, Gilbert akan diperkenalkan pada peralatan panah kategori compound. Peralatan ini didatangkan oleh KONI Mimika dalam mempersiapkan atlet. "Kami ucapkan terima kasih kepada Bupati Mimika sebagai Ketua Umum KONI dan Simon Kasamol sebagai Ketua Harian KONI Mimika yang beri dukungan penuh kepada cabang olahraga panahan mengikuti Pra PON meskipun dari KONI Papua Tengah belum ada alokasi anggaran," katanya.

Gilberth sendiri sudah siap untuk menghadapi Pra PON dan berharap bisa lolos untuk PON XXI di Aceh dan Sumatera Utara nantinya. "Saya berharap bisa memberi yang terbaik untuk Kabupaten Mimika, Papua Tengah dan sekolah yang sudah memberikan dukungan penuh," katanya.

Ini bukan ajang tingkat nasional pertama bagi Gilbert. Sebelumnya ia sudah mengikuti Kejuaraan Nasional di Bali. Bakatnya memanah diturunkan oleh ayahnya yang juga mantan altet

panahan mewakili Papua. Sehingga sejak duduk di bangku kelas V SD ia mulai tekun berlatih meski dengan peralatan seadanya.

Keikutsertaan Gilbert pada Pra PON mendapat dukungan penuh dari sekolah baik guru maupun teman-temannya. Kepala SMP Negeri 10 Mimika, Shely Daturante, SSoS mengatakan sekolah sangat bangga dengan Gilbert yang bisa mengharumkan sekolah dan juga Kabupaten Mimika dalam ajang nasional.

Sebagai bentuk dukungan, sekolah memberikan uang saku bagi Gilbert selama mengikuti kejuaraan. Begitu pula dispensasi, dimana Gilbert tidak dibebankan tugas pelajaran agar bisa fokus menjalani pertandingan sehingga memberikan yang terbaik.

Guru olahraganya sendiri mengaku baru tahu kemampuan Gilbert dalam memainkan busur panah. Sebab di sekolah tidak ada peralatan panahan dan bahkan jarang jadi materi pelajaran sekolah. Sehingga ia berharap ini menjadi ajang bagi Gilbert bahwa dengan berbagai keterbatasan, anak-anak Papua bisa tampil dan bertanding dengan atlet dari berbagai daerah di Indonesia.

(BAPPEDA)

# Bappeda Kaji Potensi Mineral Logam di Mimika

**P**EMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Mimika, Papua Tengah, melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Seminar Pendahuluan Penyusunan Dokumen Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Energi dan Mineral (Survey Tinjau Potensi Mineral Logam), berlangsung Jumat (24/11/23) di ruang rapat kantor Bappeda Mimika.

Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Septinus Timang, S.Sos., M.H., membuka kegiatan secara resmi mewakili Bupati Mimika, didampingi Sekretaris Bappeda, Joseph Manggasa, S.T., M.Si., serta Ahli Teknik Pertambangan, Dr. Andi Ilham Saman-

lagi, S.T., M.T., juga Ahli Teknik Eksplorasi Mineral, Dr. Muhammad Adam, S.T., M.T., dan Ahli Teknik Geologi Ir. Ramli, ST., M.T., sebagai narasumber dari Universitas Bosowa, Makassar.

Hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Jeffri Deda, S.Sos., Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Beatrix Pademme, S.S., M.Si., juga Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Santi Sondang, S.IP., M.Si., serta Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Spedy Paereng,

S.E., M.Si, dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Saat menyampaikan sambutan Bupati Mimika, Septinus mengatakan bahwa seminar ini sangat penting, mengingat sumber daya mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan keberadaannya terikat pada ruang tertentu, serta mempunyai jumlah yang sangat terbatas di alam.

"Sumber daya mineral dapat dipergunakan sebesar - besarnya bagi kemakmuran penduduk, dimanfaatkan dan digunakan secara arif dan bijaksana, dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan," ungkapnya.

Ia menambahkan, data dan informa-





si tentang sumber daya mineral merupakan langkah awal yang akan mendukung kegiatan eksplorasi dan penambangan.

“Ketersediaan data yang terbaru akan memudahkan Pemerintah Daerah untuk dapat mengembangkan potensi bahan tambang, menarik investasi, dan melakukan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan, guna mendukung pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya mineral,” lanjutnya.

Septinus memaparkan pula maksud dari seminar pendahuluan ini, yakni melakukan penelitian dan kajian potensi sumber daya mineral pada wilayah tertentu di Kabupaten Mimika, untuk selanjutnya melakukan pendataan dan pengidentifikasian jenis bahan galian, lokasi, luas sebaran dan perkiraan potensi hipotetik sumberdaya mineral, dari setiap jenis komoditi yang terdapat di wilayah tertentu.

Sementara itu, tujuan seminar tersebut adalah tersedianya data potensi



sumber daya bahan galian mineral logam, serta menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi investasi di bidang eksplorasi dan eksploitasi bahan galian.

“Saran saya, dalam pelaksanaannya harus juga ditelaah menyangkut sosial dan budaya, karena ketika sudah melibatkan kawasan yang ada penduduknya, ini merupakan hal yang sensitif,” pe-

sannya.

Menutup sambutannya, Septinus menyampaikan bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan data - data yang akan menjadi acuan awal, untuk tahapan eksplorasi selanjutnya, agar sumber daya mineral yang ada dapat dimanfaatkan sebaik - baiknya, untuk kesejahteraan masyarakat. (BAPPEDA)



Foto: Bappeda

# Tahun 2024, Dana Otsus Untuk Mimika Meningkatkan Lagi

**P**EMERINTAH Pusat melalui Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menetapkan pagu anggaran dana Otonomi Khusus untuk setiap kabupaten/kota untuk Tahun Anggaran 2024. Pagu untuk Kabupaten Mimika mengalami peningkatan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika, Ir Yohana Paliling, MSi mengungkapkan alokasi Dana Otus untuk Mimika di Tahun 2024 mencapai Rp 263,6 miliar. Ada peningkatan, dimana Tahun 2023 sebesar Rp 154,3 miliar.



**Pembangunan kandang ternak ayam di Kampung Mioko, Distrik Mimika Tengah dengan menggunakan Dana Otonomi Khusus**

Foto: Bappeda



**Pembangunan pabrik pengolahan sago di Kampung Mioko, Distrik Mimika Tengah menggunakan Dana Otonomi Khusus**

Ini merupakan total dana Otsus maupun dana tambahan infrastruktur yang dialokasikan untuk Kabupaten Mimika. Itu terbagi, dana block grant sebesar Rp 106,9 miliar, specific grant sebesar Rp 128 miliar dan dana tambahan infrastruktur sebesar Rp 28 miliar.

Yohana mengungkapkan Dana Otsus ini diperuntukkan bagi pendidikan, kesehatan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Juga perumahan serta kependudukan. Bahkan Dinas Komunikasi dan Informatika juga mendapat alokasi Otsus yang digunakan untuk menyiapkan infrastruktur jaringan telekomunikasi di daerah yang masih terisolir dimana mayoritas penduduknya adalah orang asli Papua.

Dikatakan Yohana, ada beberapa perubahan program seperti di pendidikan. Selama ini dana Otsus digunakan untuk pengadaan makan minum bagi siswa yang ada di pe-

sisir dan pedalaman. Tapi karena proses pencairannya bersyarat maka terkadang jadi kendala dan baru terlaksana pada pertengahan tahun. Sementara pemberian makan minum seharusnya dilakukan sejak Januari.

Untuk itu Pemkab Mimika mengambil kebijakan, untuk pemberian makan/mium bagi siswa di pesisir dan pedalaman menggunakan APBD bukan lagi dana Otsus. Sehingga dana Otsus untuk pendidikan bisa digunakan untuk program lainnya.

Selain itu, dana Otsus ini juga digunakan untuk program percepatan penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrim. Penyediaan rumah layak huni bagi orang asli Papua. “Kalau dulu, pembangunan rumah kita sebar ke banyak kampung, sekarang kita fokus di beberapa kampung agar terlihat dan bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya. (BAP-PEDA)



# Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Jadi Isu Pembahasan SDGs 8

**P**EMERINTAH Daerah Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar diskusi bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan stakeholder terkait yakni Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAM), PT Freeport Indonesia, Institut Pertambangan Nemangkawi, perbankan dan lembaga pendidikan bahas pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, Kamis (23/11/2023) di Hotel Swiss Belin.

Diskusi yang dikemas dalam ajang Para-para SDGs Timika Noken 'No Kom-en' (PaSTi NoKen) ini membahas SDGs ke-8.

Sekretaris Bappeda Mimika, Joseph Manggasa, ST MSi mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan yang berkelanjutan. SDGs ini sendiri terakhir kalinya diadakan Tahun 2023 ini sesuai dengan jadwal pelaksanaannya yakni setiap triwulan. Pada triwulan pertama sudah dilaksanakan pembicaraan yang fokus pada persoalan air bersih. Dilanjutkan triwulan kedua yakni membicarakan topik malaria. SDGs triwulan ketiga mengambil topik mengenai pendidikan di Kabupaten Mimika. Untuk SDGs terakhir tahun ini diambil topik ketenagakerjaan dan ekonomi.

Didalam SDGs, topik ketenagakerjaan dan ekonomi masuk ke dalam tujuan 8. "Ini merupakan rangkaian pertemuan kita didalam pelaksanaan SDGs yang kali ini kita akan berbagi mengenai ketenagakerjaan di Kabupaten Mimika," ujarnya.

Dari panelis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika, Institut Pertambangan Nemangkawi, Yayasan Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAM), ditampilkan sebagai contoh pelaku ketenagakerjaan di Timika. "Jadi



Foto: Bappeda

kita maksudkan untuk tempat diskusi tentang apa yang dilakukan oleh semua stakeholder dalam melakukan program pembangunan berkelanjutan, utamanya untuk tujuan ke-8 yakni pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Mimika kata dia terus bermitra dengan stakeholder terkait. Hal ini dilakukan karena tujuan pembangunan harus dilakukan berdasarkan partisipasi semua pihak baik pemerintah, lembaga swasta maupun masyarakat umum. Lewat forum kemitraan ini, pemerintah merespon dan mengapresiasi keterlibatan semua pihak untuk bersama-sama melihat masalah di Kabupaten Mimika dan memikirkan apa yang akan dibuat masing-masing untuk mengambil bagian sesuai dengan peran masing-masing.

Dengan forum kemitraan ini diharapkan sasaran dari kegiatan di lintas sektor, baik di pemerintah maupun di swasta dan peran masyarakat bisa lebih meningkatkan kualitas pencapaian sasaran pembangunan sesuai tupoksi masing-masing.

"Forum semacam ini di tingkat kabupaten se Indonesia, baru ada di Timika, ternyata kolaborasi kita antara pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat, untuk kita belajar, berdiskusi," ungkapnya.

Dari forum kemitraan ini memang selalu diangkat topik-topik yang menarik, mulai air bersih, malaria, pendidikan sampai ketenagakerjaan. Tahun depan diagenda topik lain seperti pangan, kesehatan, pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sementara itu, khusus untuk pemerintah, forum kemitraan ini sebagai bagian untuk mensinkronisasikan kegiatan-kegiatan pemerintah maupun kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar pemerintah.

Dengan adanya potensi-potensi stakeholder terkait dengan pemerintah inilah yang coba dirangkum semua agar bisa disinkronisasikan program kegiatan agar tidak bertumpuk di tempat yang sama.

"Di forum ini kita bisa berbagi peran, kita tau perusahaan di Timika punya potensi yang cukup dioptimalkan untuk tanggung jawab sosial, ini belum dimaksimalkan, lewat SDGs ini kita coba ketemu, dua tiga tahun lalu kita jalan sendiri-sendiri, dalam forum ini kita mulai komunikasi dengan baik, padukan program kita dan kita harapkan program ini ujung-ujungnya akan meningkatkan sasaran kita ke masyarakat, ujung-ujungnya masyarakat asli di Kabupaten Mimika," pungkasnya. (BAPPEDA)

# Pendapatan Pemkab Mimika Ditarget Naik Setelah Penetapan Perda

**P**ADA RAPBD Tahun 2024 mendatang, pendapatan ditargetkan meningkat. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Mimika dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah mendorong percepatan penetapan Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Saat ini Raperda tersebut mulai diparipurnakan oleh DPRD Mimika.

Kepala Bapenda Mimika, Drs Dwi Cholifah, Rabu (15/11/2023) mengatakan pengusulan Raperda tersebut sudah dilakukan sejak tahun lalu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah. "Kami sudah usulkan ini untuk peningkatan pajak daerah," ujarnya.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keu-

angan Pusat dan Daerah maka setiap kabupaten/kota maupun provinsi harus membuka Perda tentang pajak dan retribusi daerah.

Sebelum diparipurnakan, Bapenda telah menyusun naskah akademis, pembahasan dengan Bapemperda DPRD Mimika serta harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Sekarang masuk dalam paripurna untuk ditetapkan. Setelah itu Bupati akan bersurat ke Gubernur, Kemendagri dan Kementerian Keuangan untuk dievaluasi sebelum diterapkan.

"Tahun depan langsung bisa dieksekusi, ada peningkatan beberapa jenis pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan kepada

perusahaan-perusahaan," jelas Dwi.

Dalam Raperda tersebut diungkapkan Dwi, terjadi beberapa perubahan. Ada 10 objek pajak dan 18 retribusi yang mengalami penurunan dari sebelumnya ada 32 jenis. Ini dikarenakan sesuai aturan, daerah tidak boleh menarik retribusi kendaraan bermotor dan tera ulang.

Ia menyatakan, meski objek pajak tidak bertambah namun untuk menggenjot penerimaan maka ada penyesuaian tariff. Seperti retribusi parkir di bandara yang tadinya Rp 1000 untuk motor dinaikkan jadi Rp 4000. Sementara mobil yang tadinya Rp 2000 dinaikkan jadi Rp 5000. (**BAP-PEDA**)



Foto: Bappeda



*Mimika Membangun*